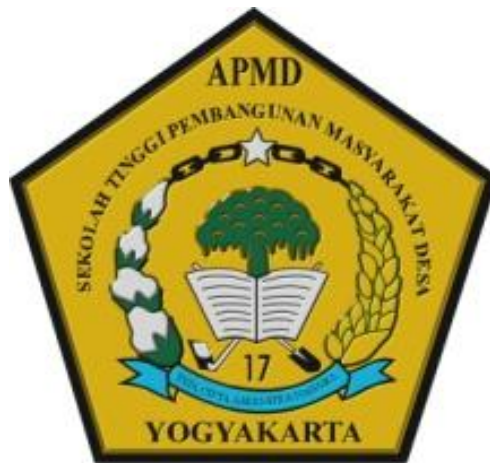


SKRIPSI

**UPAYA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
MELALUI PAJAK REKLAME**



Disusun Oleh:

MUHAMAD ADUM PAMUNGKAS

13520004

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2017**

**UPAYA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
MELALUI PAJAK REKLAME**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
2017**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan didepan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 20 Oktober 2017
Pukul : 10:00
Tempat : Ruang M. Soetopo Timur STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA

APMD

TANDA TANGAN

Dra. Safitri Endah Winarti, M.Si
Penguji/Pembimbing


.....

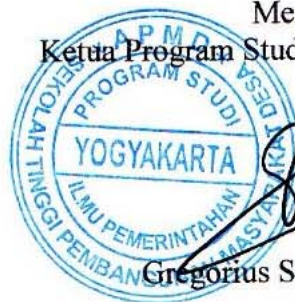
Dr. Supardal, M.Si.
Penguji Samping 1



.....

Dra. Sri Utami, M.Si.
Penguji Samping 2


.....

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan (S1)




Gregorius Sahdan, S.IP., MA.

MOTTO

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ
أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ { ٢٤٣ }
وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ { ٢٤٤ }

“Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu (jumlahnya) karena takut mati, maka Allah berfirman kepada mereka : “matilah kamu”, kemudian Allah menghidupkan mereka. sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. – dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

(Q.S. AL BAQARAH : 243 - 244)

TUHAN MEMBERIKAN JALAN, KITA YANG MENJALANKAN

NEVER TOO OLD TO LEARN. EVEN AT 21 YOU GOTTA START SOMETIME

NO ONE CAN'T TAKE AWAY OUR MEMORIES

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirobbil'amin saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta nikmat yang teramat banyak, dan junjungan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis bisa menyelesaikan Studi di Program Strata 1 (S1) Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Untuk kedua orang tua saya, H. Suhud Maduprojo dan Hj. Rosmawati yang selalu membimbing dan memberikan do'a serta semangat buat saya dengan tak pernah lelah mendidik saya untuk selalu mencari ilmu, belajar, ibadah, dan berdoa.
2. Ibu dosen pembimbingku tercinta Dra. Safitri Endah Winarti M.Si terimakasih dukungan dan kesabarannya membimbing.
3. Buat Mas Galeh dan Mbak Riska yang telah memberikan dorongan terus menerus dalam penyelesaian skripsi ini sehingga terselesaikan dengan tepat waktu.
4. Adik-adiku Refly Pratama dan Keke Kusuma yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman dan para sahabat di jogja, Ade Rizal. S.IP, Yanra sutriaji S. Pd., Ligan Nico Yulio S. Par., Hasan Abdul Latif S. Par., Dasa S.IP. Candra. S.IP, kandoku Igo Saputra dan Syeh Abdul Rais
6. Seluruh anggota Milanisti Indonesia Sezione Jogja.
7. Teman seperjuangan angkatan 2013 lainnya yang banyak bantu saya dalam penyelesaian Skripsi ini.
8. Dan informan yang telah memberikan banyak informasi dan membantu saya terutama khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta dan Biro Periklanan Reklame.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Azza Wa Jalla yang telah memberikan nikmat, hidayah serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa kendala dan halangan suatu apapun. Dengan judul **“Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pajak Reklame”**. Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) pada prodi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Bantuan dan dukungan baik berupa moril dan spiritual dari semua pihak sangat membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Habib Muhsin, S.Sos, M.Si. selaku ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Gregorius Sahdan, S.Ip., MA. Selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
3. Dra, Safitri Endah Winarti, M.Si. sebagai dosen pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan serta arahnya sehingga sampai terselesaikannya skripsi ini.
4. Dosen penguji samping 1 (satu) Dr. Supardal, M.Si.
5. Dosen penguji samping 2 (dua) Dra. Sri Utami, M.Si. yang telah menguji dan memberi arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen yang telah banyak memberikan materi kuliah khususnya dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
7. Seluruh staff dan karyawan-karyawati Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pihak-pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 12 Juni 2017

(M. Adum Pamungkas)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
SINOPSIS.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual	8
E.1. Pengertian kata “upaya”	8
E.2. Pengertian Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Daerah	8
E.3. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	10
E.4. Pengertian Pajak Daerah	12
E.5. Kontribusi Pajak Reklame terhadap Total Pajak Daerah	16
E.6 Konsep tentang upaya yang bisa dilakukan Pemkot dalam meningkatkan Pajak Reklame dan kendala yang dihadapi	17
F. Ruang Lingkup	19
G. Metode Penelitian	19
G.1.Jenis Penelitian.....	19
G.2. Unit Analisis	20

G.3. Teknik Pengumpulan Data.....	22
G.4. Teknik Analisis Data	24
BAB II PROFIL	26
A. Latar Belakang Berdirinya DPDPKA	26
B. Visi dan Misi	26
C. Kedudukan dan Tugas Pokok	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Deskripsi Identitas Informan Secara Umum.....	49
1. Deskripsi informan berdasarkan Jenis Kelamin	50
2. Deskripsi Informan Berdasarkan Usia	51
3. Deskripsi informan berdasarkan tingkat pendidikan.....	51
B. Regulasi yang digunakan DPPKAD dalam pengelolaan Pajak Reklame di Kota Yogyakarta.....	52
C. Pendaftaran dan Pendataan DPPKAD terhadap Pajak Reklame di Kota Yogyakarta	57
D. Tingkat Efektivitas dalam pengelolaan Pajak Reklame di Kota Yogyakarta	65
BAB IV PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Manusia	27
Tabel 2.2	Ketetapan Pajak yang Diterbitka	35
Tabel 3.1	Deskripsi Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	50
Tabel 3.2	Deskripsi Informan Berdasarkan Umur.....	50
Tabel 3.3	Deskripsi Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	51
Tabel 3.4	Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2012	66
Tabel 3.5	Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2014.....	69
Tabel 3.6	Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2015	71
Tabel 3.7	Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2016	72
Tabel 3.8	Laporan anggaran dan realisasi pajak reklame	74

SINOPSIS

Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pajak Reklame, menegaskan bahwa penataan dan pengelolaan keuangan, haruslah profesional, efektif serta efisien, transparansi dan bertanggung jawab. Melalui upaya yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ingin semakin meningkatnya pendapatan asli daerah yang signifikan dan upaya pembiayaan bagi kegiatan pelayanan masyarakat dan pembangunan di daerah. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui upaya BPKAD dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak reklame dengan beberapa hal yang dilakukan BPKAD dalam menertibkan reklame seperti adanya reklame liar, reklame yang tidak berizin dan atau reklame yang izinnya sudah habis namun masi tetap berdiri dan memasang iklan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif yakni peneliti mencoba menggambarkan data sesuai fakta di lapangan, dan dilakukan sedekat mungkin sesuai dengan bentuk aslinya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik Snow Ball sehingga jumlah peneliti ditentukan ketika melakukan penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu, Kasubid Pembukuan dan Perkantoran, Staf Pelayanan Pajak Daerah, Sekretariat BPKAD, Staf Bidang Akuntansi BPKAD, Kasubid Pendaftaran dan Penataan Pendapatan Daerah, Biro Periklanan Reklame, dan Masyarakat Pengguna Reklame. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian tentang Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Reklame serta tingkat efektivitas dalam pengelolaan pajak reklame di Kota Yogyakarta yakni dengan melakukan upaya pendataan dilapangan, ada tim pendataan berjalan serta di kantor, melakukan peningkatan tarif pajak reklame, pembedaan tarif reklame rokok dan non rokok, pentaan reklame di ruas-ruas jalan yang potensial, dan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait. Dan dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sepenuhnya sudah baik, namun masih terdapat masalah pada bagian pendataan karena masih banyak reklame liar atau tidak berizin berdiri. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya pengawasan terhadap reklame liar. Kedua, kurangnya kesadaran Masyarakat/badan usaha pengguna reklame tentang pentingnya membayar pajak. Sebab Masyarakat/badan usaha yang cenderung malas mengurus dan cenderung tidak mau ikut berpartisipasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah guna membangun daerah. Ketiga, meningkatkan pendapatan asli daerah BPKAD sudah melakukan tugasnya dengan baik dalam memberikan usahanya dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak reklame. Namun realisasi pajak reklame masih saja mengalami penurunan dan kenaikan di setiap tahunnya ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional suatu rangkaian untuk upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh kehidupan di masyarakat, bangsa dan negara. Pembangunan merupakan segala pemanfaatan potensi yang ada di masing-masing daerah, maka pembangunan pada saat ini lebih diarahkan kepada masing-masing daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pembangunan ekonomi juga merupakan suatu proses dimana pemerintah dan masyarakat mengelola sumber daya yang sudah ada, membentuk suatu mitra antara pemerintah daerah dan swasta, untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru yang dapat mengembangkan ekonomi di daerah.

Mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan mengembangkan pelaku dan potensi ekonomi yang berada di daerah, serta memperhatikan ruang fisik maupun sosial sehingga terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi agar sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk itu pada tahun 2000 diberlakukan otonomi daerah dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 22 Tahun 1999, yang diperbarui dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004, yang selanjutnya diperbarui dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Otonomi adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri maupun kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah diberikan kebebasan agar dapat menggali sumber-sumber potensi yang menghasilkan keuangan daerah guna untuk membiayai pembangunan serta meningkatkan pendapatan asli daerah dan pusat daerah otonom. Dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 pasal 1 poin 12 dijelaskan bahwa pembangunan daerah sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Daerah otonom adalah daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa panataan dan pengelolaan keuangan daerah, haruslah professional, efektif serta efisien, transparansi dan bertanggung jawab. Sasaran yang ingin dicapai adalah semakin meningkatnya pendapatan asli daerah yang signifikan dan pembiayaan bagi kegiatan pelayanan masyarakat dan pembangunan di daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 285 sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai macam kegiatan daerah otonom terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah meliputi
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- 2) Pendapatan transfer :
- a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:
 - Dana Perimbangan
 - Dana Otonomi Khusus
 - Dana Keistimewaan
 - Dana Desa
 - b. Transfer antar Daerah terdiri atas:
 - Pendapatan bagi hasil
 - Bantuan Keuangan
- 3) Lain-lain pendapatan yang sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pelaksanaan hak dan kewajiban pemerintah daerah, serta pemanfaatan potensi atau sumber daya daerah, baik yang dimiliki oleh Pemerintah daerah maupun yang terdapat di wilayah daerah bersangkutan, yang mana pemungutannya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah karena merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah, dimana proporsi PAD terhadap total penerimaan merupakan indikasi “Derajat Kemandirian” keuangan suatu pemerintah daerah. Sumber-sumber PAD sebenarnya sangatlah diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bagi pendanaan daerah dan diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan daerahnya. Semakin banyak kebutuhan daerah yang dapat dibiayai dengan PAD, maka akan semakin tinggi kualitas

otonominya.(Dini, 2010)Seperti halnya daerah lain, kota Yogyakarta juga melakukan pungutan pajak guna menambah pendapatan daerah untuk membiayai segala kegiatan di daerah. Dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, pasal 2 ada beberapa ruang lingkup pajak yang dipungut oleh pemerintah kota Yogyakarta terdiri dari:

1. Pajak Reklame
2. Pajak Hotel
3. Restaurant
4. Pajak Hiburan
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Air Tanah
8. Pajak Sarang Burung Walet

Dari berbagai jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kota Yogyakarta, pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki prospek positif yang bisa dikembangkan dan peranannya dapat meningkatkan PAD.

Yogyakarta merupakan kota yang pertumbuhan dan perkembangan perekonomiannya bisa dikatakan relatif cepat. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan perekonomian di kota Yogyakarta dari berbagai sektor khususnya industri pariwisata dan perdagangan tumbuh begitu pesat. Jika dipantau dari segi perdagangan dapat dilihat dari semakin maraknya pusat-pusat perbelanjaan dan hotel yang didirikan di kota Yogyakarta.

Sejalan dengan perkembangan dunia usaha industri, perdagangan dan jasa di wilayah kota Yogyakarta yang semakin kompleks, maka para pelaku usaha dituntut untuk bersaing. Upaya yang dilakukan antara lain menggunakan strategi pemasaran media advertising atau periklanan melalui reklame guna menampilkan produk dan jasa industrinya kepada masyarakat.

Seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 47, objek pajak reklame meliputi, Reklame Papan (Billboard), Stiker (Poster), Kain, Selebaran, Reklame Berjalan (termasuk pada kendaraan), Peragaan, Film/Slide maupun media elektronik seperti Videotron, Megatron, Large Electronik Display (LED)

Dengan melihat perkembangan ini, maka penerimaan PAD dari sektor pajak reklame tentunya memiliki potensi yang cukup besar, karena setiap perusahaan ataupun perorangan akan lebih banyak menggunakan media reklame untuk mempromosikan berbagai jenis kegiatan usaha dan produk mereka. Pajak reklame adalah konsekuensi wajib pajak yang dikenakan kepada individu atau badan usaha atas penyelenggaraan reklame, wajib pajak penyelenggaraan telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Di Kota Yogyakarta Pajak Reklame diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame. Reklame menjadi media promosi yang menjadi cara efektif untuk tujuan memperkenalkan atau mempromosikan barang, jasa, orang atau badan yang dapat diketahui oleh khalayak umum. Hal ini dapat dilihat dari sudut-sudut

kota Yogyakarta baik di pusat kota maupun pinggiran kota yang banyak terpampang berbagai macam reklame.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame, hendaknya dilaksanakan dan ditetapkan dengan tegas oleh pemerintah Kota Yogyakarta kepada penyelenggara-penyelenggara reklame. Hal tersebut perlu dilakukan karena pada saat ini wilayah Kota Yogyakarta banyak sekali memiliki papan reklame, dari berbagai bentuk, gambar, ukuran dan warna yang beraneka ragam.

Masalah umum yang terjadi adalah terdapat kekurangan terhadap pengawasan dari aparat pemerintah kota dalam rangka pengelolaannya. Salah satu masalah yang terjadi adalah adanya reklame yang tanpa izin pemasangan dari pemerintah kota ataupun reklame yang perizinannya sudah mati. Dikutip dari Suara Merdeka Cetak (berita.suaramerdeka.com) pada tanggal 6 Juni 2017 dengan Headline atau judul berita (200 Papan Reklame di Yogyakarta Tak Bertuan). Dari hasil pemantauan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Energi Sumber Daya Mineral (DPU-ESDM) menemukan 200 papan reklame yang tidak berizin dan tidak diketahui pemiliknya oleh pemerintah daerah yang member izin. Jalan provinsi yang banyak dipasang adalah kota Yogyakarta dan Sleman. Oleh karena itu, bila papan reklame ini dibiarkan akan mengganggu pemandangan serta keindahan kota. Untuk itu pemerintah daerah selaku pemberi izin hendaknya segera menertibkan dan menindak tegas.

Selain itu banyak media reklame yang terpasang tidak sesuai, seperti dalam hal proporsi, konstruksi, keselarasan penempatan antara yang satu

dengan yang lainnya, sehingga timbul suatu kesan tidak harmonis sehingga dapat mengganggu estetika kota juga dapat memberikan kesan tidak nyaman dan mengganggu keselamatan masyarakat serta menimbulkan efek saling berebut perhatian, sehingga informasi yang disampaikan menjadi tidak efektif. Disisi lain, kontribusi pajak reklame terus diharapkan akan semakin meningkat dari tahun ketahun untuk menambah penerimaan PAD agar tujuan otonomi daerah untuk menciptakan kemandirian daerah di sektor keuangan akan terwujud.

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengoptimalkan pajak reklame dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Reklame ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menggambarkan upaya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Yogyakarta dalam meningkatkan PAD melalui Pajak Reklame
2. Untuk menggambarkan besarnya kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Pajak Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Irma. S. Rusdy. 2014 Skripsi *Analisis Potensi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar*
- Mardiasmo. 2000. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI, Yogyakarta
- Moleong Lexy J (2010), *Metodologi penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Misdianti dan Kartasapoetra. 1993. *Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah*. Bumi Aksara.Jakarta
- Nurcholis, Enceng dan Amin. 2010. *Administrasi Pemerintahan Daerah*.Universitas Terbuka.Jakarta
- Pamudji S. 1985. *Kerja sama antar Daerah dalam rangka membina wilayah*, Bumi Aksara, Jakarta
- Santosa, Purbayu Budi., dan Rahayu, Retno Puji. 2005. “*Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Faktor –Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kediri*”, *Jurnal Dinamika Pembangunan* Vol.2 No1/lull 2005 :9 -18.
- Siahaan, M.P. 2010, *pajak daerah dan retribusi daerah*.Edisi revisi, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Soemarso S.R. 2007, *Perpajakan*, Salemba empat, Jakarta
- Siahaan M. P. 2013. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Edisi revisi. Rajawali Pers.Jakarta
- Sugiyono (2013), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi(Mixed Methods)*, Alfabeta cv, Bandung.
- Sugiyono (2013),*Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*,Alfabeta cv, Bandung.
- Sugianto. 2008. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta
- Taufik, Irwan. R. 2009. *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia*. Sekolah Pascasarjana UGM. Yogyakarta
- Zuraida, ida. 2014 *Teknik PenyusunanPeraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.Sinar Grafikas. Jakarta

Sumber lainnya:

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame

Peraturan Walikota Nomor 23 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksana
Penyelenggaraan Reklame

Peraturan Walikota Nomor 24 tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Konstruksi
Reklame

Peraturan Walikota Nomor 25 tahun 2016 tentang Tarif Pajak Reklame